



**SERI KEBIJAKSANAAN DEPARTEMEN
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Sistem Penyelenggaraan Sekolah Unggul

**Direktorat
Budaya**

**Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia**

370.2

1993

1

**SISTEM PENYELENGGARAAN
SEKOLAH UNGGUL**

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1993**

KATA PENGANTAR

Dalam rangka memasyarakatkan kebijaksanaan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, telah dibentuk Kelompok Kerja Pemasyarakatan Kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan Surat Keputusan Mendikbud Nomor 0280/P/1993 tanggal 26 Juli 1993. Maksud dibentuknya Kelompok Kerja ini adalah untuk menanggapi dan memberikan penjelasan kepada masyarakat mengenai berbagai kebijaksanaan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di bidang pendidikan dan kebudayaan. Topik-topik yang dimasyarakatkan disesuaikan dengan isu-isu yang berkembang dan banyak disoroti oleh masyarakat, baik isu-isu yang bersifat terus menerus (latent) maupun yang bersifat temporer.

Dalam menjalankan tugasnya, Kelompok Kerja ini menggunakan dua strategi. **Pertama**, menanggapi secara proporsional isu-isu yang muncul dalam masyarakat mengenai pendidikan dan kebudayaan. **Kedua**, secara teratur memberikan penjelasan kepada masyarakat tentang berbagai kebijaksanaan di bidang pendidikan dan kebudayaan sehingga masyarakat memiliki wawasan dan pengertian yang benar mengenai kebijaksanaan tersebut.

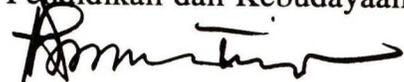
Untuk melaksanakan kegiatan tersebut, telah dibentuk Satuan Tugas yang terdiri atas Satuan Tugas Media Televisi, Satuan Tugas Media Radio, Satuan Tugas Media Cetak, dan Satuan Tugas Khusus. Keempat Satuan Tugas tersebut bekerja secara terpadu di bawah kendali Tim Pengarah Kelompok Kerja ini.

Buku ini menyajikan naskah induk tentang **Sistem Penyelenggaraan Sekolah Unggul**. Penyusunan naskah induk ini bertujuan agar ada kesamaan bahasa mengenai materi yang dimasyarakatkan sehingga naskah induk ini dapat berfungsi sebagai kerangka acuan yang efektif bagi Kelompok Kerja dalam pelaksanaan tugasnya.

Demikian naskah induk ini disusun untuk menjadi pegangan bagi Kelompok Kerja Pemasarakatan Kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Jakarta, 30 Nopember 1993

Ketua Tim Pengarah
Kelompok Kerja Pemasarakatan
Kebijaksanaan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan



Dr. A. W. Pratiknya

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
I. Rasional	1
II. Pengertian dan Ciri-ciri Sekolah Unggul ...	5
III. Filosofi	8
IV. Dasar Hukum	11
V. Visi dan Misi	12
VI. Tujuan	13
VII. Sasaran	14
VIII. Kurikulum	14
IX. Proses Belajar-Mengajar	16
X. Tenaga Kependidikan	24
XI. Fasilitas Pendidikan	27
XII. Evaluasi	28
XIII. Model Pengelolaan	29
XIV. Aspek Pengelolaan	29
XV. Pembiayaan	30

SISTEM PENYELENGGARAAN SEKOLAH UNGGUL *)

I. Rasional

Perlunya perhatian khusus kepada peserta didik yang memiliki kemampuan dan kecerdasan luar biasa melalui sekolah-sekolah yang mengutamakan keunggulan adalah selaras dengan fungsi utama pendidikan, yaitu mengembangkan potensi peserta didik secara utuh dan optimal. Pengembangan potensi tersebut memerlukan strategi yang sistematis dan terarah.

Strategi pendidikan yang ditempuh selama ini yang bersifat masal cenderung memberikan perlakuan yang standar atau rata-rata kepada semua peserta didik sehingga kurang memperhatikan perbedaan antar individu peserta didik dalam kecerdasan, kecakapan, minat, dan bakatnya. Strategi ini sah dalam konteks pemerataan kesempatan pendidikan, tetapi strategi masal tersebut tidak akan mampu menunjang usaha mengoptimalkan pengembangan potensi

*) Penggunaan istilah "Sekolah Unggul" pada naskah ini sama sekali tidak mengacu pada konsep eksklusivisme. Dengan demikian, istilah "Sekolah Unggul" di sini pada prinsipnya sama dengan "Sekolah Plus".

sumberdaya manusia secara cepat. Dengan strategi tersebut, munculnya siswa yang berprestasi unggul terjadi secara acak (random), dan sangat tergantung kepada motivasi belajar setiap peserta didik serta lingkungan belajarnya.

Hasil beberapa penelitian menunjukkan bahwa sekitar sepertiga peserta didik yang dapat digolongkan sebagai siswa yang berbakat (**gifted and talented**) mengalami gejala "prestasi kurang" (**underachievement**). Salah satu penyebabnya adalah lingkungan belajar yang kurang menantang kepada mereka untuk mewujudkan kemampuannya secara optimal. Padahal, upaya untuk mencapai keunggulan melalui strategi masal akan mempunyai konsekuensi kebutuhan sumberdaya (dana, tenaga, dan sarana) yang besar. Untuk memecahkan masalah ini, perlu dikembangkan strategi alternatif yang bertujuan menghasilkan lulusan yang unggul, yaitu dengan cara memberikan perhatian dan perlakuan kepada peserta didik sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya. Strategi alternatif ini dimaksudkan untuk mengimbangi kekurangan yang terdapat pada strategi masal-konvensional.

Namun demikian, dengan adanya strategi kedua tersebut tidak berarti peningkatan kualitas pendidikan melalui strategi masal diabaikan. Kedua strategi tersebut berjalan bersama-sama; dan antar keduanya tidak ada perbedaan yang hakiki dalam hal misi, fungsi, dan tujuan pendidikan. Memang ada perbedaan antar kedua strategi tersebut, tetapi perbedaan itu tidak dalam hal prinsip.

Perbedaan antar keduanya hanya dalam hal intensitas dan ekstensitas perhatian dan perlakuan yang diberikan kepada peserta didik yang disesuaikan dengan kondisi mereka.

Alasan berikutnya adalah tantangan global dan persaingan antarbangsa yang semakin nyata serta agenda pembangunan dalam Pembangunan Jangka Panjang Kedua (PJP II) yang menuntut tersedianya sumberdaya manusia yang unggul, yang tidak hanya mampu bersaing dalam lingkup nasional tetapi juga mampu bersaing dalam lingkup global. Padahal kenyataan sekarang menunjukkan bahwa secara umum kualitas sumberdaya manusia Indonesia masih belum sesuai dengan tuntutan kemampuan bersaing; dan karena itu diperlukan upaya-upaya yang serius untuk mengatasinya. Dalam hubungan ini, peserta didik yang memiliki potensi yang unggul atau yang biasa disebut dengan istilah "anak berbakat" (**gifted and talented children**) merupakan asset bangsa yang sangat berharga yang secara potensial mampu merespons tantangan bangsa di masa kini dan di masa yang akan datang, khususnya pada 25 tahun mendatang. Asset itu harus tidak disia-siakan, dan seharusnya dikembangkan secara sistematis melalui pendidikan.

Secara statistik, jumlah mereka yang termasuk "**gifted and talented**" sangat besar. Dengan menggunakan asumsi 5% dari total peserta didik mulai SD sampai dengan SLTA yang berjumlah sekitar 40.454.000 orang (masing-masing 29,598.800 orang di tingkat SD/MI, 6.741.300 orang di tingkat SLTP, dan 4.411.200 orang di tingkat SLTA),

maka secara keseluruhan terdapat sekitar 2.022.700 orang peserta didik yang termasuk kelompok tersebut. Dengan potensi intelektualnya yang istimewa (di atas rata-rata peserta didik pada umumnya) dan kemampuan belajarnya yang unggul mereka layak mendapatkan perhatian khusus melalui pendidikan.

Seandainya dalam 25 tahun mendatang 10% saja dari jumlah itu dapat berhasil dikembangkan secara optimal, baik melalui strategi pertama maupun yang kedua, maka akan terdapat sekitar 200.000 tambahan manusia unggul yang berada pada front terdepan pembangunan nasional. Angka tersebut akan semakin besar manakala sistem dan praktek pendidikan kita benar-benar memberikan peluang yang maksimal kepada mereka untuk mewujudkan kemampuannya.

Kesadaran akan pentingnya potensi manusia unggul untuk dikembangkan menjadi potensi nasional berlangsung di banyak negara, baik di negara berkembang maupun di negara maju. Singapura telah lebih dahulu memproyeksikan perlunya keunggulan dalam pendidikan, bahkan mulai tahap perkawinan yang disebut "kebijakan pro-kelahiran" dari Lee Kuan Yew pada pertengahan tahun 1980-an.

Di Amerika Serikat, dilaporkan bahwa "Lebih dari separoh populasi siswa yang tergolong cerdas atau berbakat tidak dapat mencapai prestasi yang seharusnya mereka tampilkan di sekolah, sesuai dengan potensi yang dimilikinya". Karena itu direkomendasikan bahwa populasi

anak tersebut perlu mendapatkan perlakuan khusus, antara lain melalui kurikulum yang diperkaya dan/atau yang diakselerasikan (**enrichment and/or acceleration**).

Berdasarkan pemikiran-pemikiran tersebut di atas maka sangat beralasan perlunya dikembangkan sekolah unggul.

II. Pengertian dan ciri-ciri sekolah unggul

Sekolah unggul adalah sekolah yang dikembangkan untuk mencapai keunggulan dalam keluaran (**output**) pendidikannya. Untuk mencapai keunggulan tersebut, maka masukan (**input/intake** misalnya, guru dan tenaga kependidikan, manajemen, layanan pendidikan, dan sarana penunjangnya) serta proses pendidikan diarahkan untuk menunjang tercapainya tujuan tersebut.

Adapun dimensi-dimensi keunggulan sekolah ini meliputi hal-hal sebagai berikut.

- a. Masukan (**input, intake**) berupa siswa yang diseleksi secara ketat dengan menggunakan kriteria tertentu dan prosedur yang dapat dipertanggungjawabkan. Adapun kriteria yang digunakan adalah sebagai berikut.

- 1) Prestasi belajar siswa yang superior dengan indikator: angka rapor, Nilai Ebtanas Murni (NEM), dan hasil tes prestasi akademik lainnya.
 - 2) Skor psiko-test yang meliputi inteligensi dan kreativitas.
 - 3) Tes fisik.
- b. Sarana dan prasarana yang menunjang untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa serta dapat menyalurkan minat dan bakatnya, baik dalam kegiatan kurikuler maupun ekstra-kurikuler.
 - c. Lingkungan belajar yang kondusif untuk terwujud dan berkembangnya potensi keunggulan menjadi keunggulan yang nyata, baik lingkungan dalam arti fisik maupun sosial-psikologis.
 - d. Guru dan tenaga kependidikan yang menanganinya harus guru/tenaga kependidikan yang terpilih mutunya, baik dari segi penguasaan materi pelajaran, penguasaan metode mengajar, maupun komitmen mereka dalam melaksanakan tugas. Untuk itu, perlu disediakan insentif tambahan bagi guru, baik berupa uang maupun fasilitas lainnya, seperti perumahan guru.
 - e. Kurikulum yang diperkaya. Meskipun berpegang pada kurikulum nasional yang standar, perlu dilakukan

pengembangan dan improvisasi secara maksimal sesuai dengan tuntutan belajar peserta didik yang memiliki kecepatan belajar serta motivasi belajar yang lebih tinggi dibandingkan dengan siswa seusianya. Untuk itu perlu dilakukan pengayaan dan/atau percepatan kurikulum (**enrichment and/or acceleration**).

- f. Rentang waktu belajar di sekolah lebih panjang/lama dibandingkan dengan sekolah lain; dan untuk itu perlu disediakan sarana dan prasarana penunjang, termasuk asrama. Asrama diperlukan untuk mengoptimalkan upaya pembinaan dan untuk menampung para siswa yang berasal dari berbagai lokasi geografis. Di kompleks asrama, dilengkapi dengan berbagai sarana penunjang, misalnya alat-alat olahraga dan kesenian, perpustakaan, dan sarana/prasarana lainnya guna menyalurkan minat dan bakat siswa.
- g. Proses belajar-mengajar yang berkualitas dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan (**accountable**) kepada siswa, lembaga, dan masyarakat.
- h. Nilai lebih (**plus**) dari sekolah unggul terletak pada perlakuan tambahan di luar kurikulum nasional melalui pengembangan materi kurikulum, program pengayaan dan perluasan serta percepatan, pengajaran remedial, pelayanan bimbingan dan penyuluhan/konseling yang berkualitas, pembinaan kreativitas dan

disiplin, sistem asrama, dan kegiatan ekstra-kurikuler lainnya.

- i. Pembinaan kemampuan kepemimpinan (**leadership**) yang menyatu dalam keseluruhan sistem pembinaan siswa dan melalui praktek langsung dalam kehidupan sehari-hari, bukan sebagai materi pelajaran.
- j. Sekolah unggul merupakan bagian dari sistem pendidikan nasional. Artinya, ia inklusif dalam sistem pendidikan nasional, tidak berada di luar sistem pendidikan nasional (tidak eksklusif). Konsekuensinya, sekolah ini tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang ada, meskipun ia juga memiliki keleluasaan sesuai dengan misi dan tujuannya serta status pengelolaannya.
- k. Sekolah unggul diproyeksikan untuk menjadi pusat keunggulan (**agent of excellence**) bagi sekolah-sekolah di sekitarnya. Artinya, sekolah ini bukan hanya memberikan manfaat kepada peserta didik yang ada di dalam sekolah tersebut, tetapi juga memiliki resonansi sosial kepada lingkungan di sekitarnya.

III. Filosofi

Sekolah unggul didasari filosofi yang berkenaan dengan hakikat manusia, hakikat pembangunan nasional,

pengembangan dan improvisasi secara maksimal sesuai dengan tuntutan belajar peserta didik yang memiliki kecepatan belajar serta motivasi belajar yang lebih tinggi dibandingkan dengan siswa seusianya. Untuk itu perlu dilakukan pengayaan dan/atau percepatan kurikulum (**enrichment and/or acceleration**).

- f. Rentang waktu belajar di sekolah lebih panjang/lama dibandingkan dengan sekolah lain; dan untuk itu perlu disediakan sarana dan prasarana penunjang, termasuk asrama. Asrama diperlukan untuk mengoptimalkan upaya pembinaan dan untuk menampung para siswa yang berasal dari berbagai lokasi geografis. Di kompleks asrama, dilengkapi dengan berbagai sarana penunjang, misalnya alat-alat olahraga dan kesenian, perpustakaan, dan sarana/prasarana lainnya guna menyalurkan minat dan bakat siswa.
- g. Proses belajar-mengajar yang berkualitas dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan (**accountable**) kepada siswa, lembaga, dan masyarakat.
- h. Nilai lebih (**plus**) dari sekolah unggul terletak pada perlakuan tambahan di luar kurikulum nasional melalui pengembangan materi kurikulum, program pengayaan dan perluasan serta percepatan, pengajaran remedial, pelayanan bimbingan dan penyuluhan/konseling yang berkualitas, pembinaan kreativitas dan

disiplin, sistem asrama, dan kegiatan ekstra-kurikuler lainnya.

- i. Pembinaan kemampuan kepemimpinan (**leadership**) yang menyatu dalam keseluruhan sistem pembinaan siswa dan melalui praktek langsung dalam kehidupan sehari-hari, bukan sebagai materi pelajaran.
- j. Sekolah unggul merupakan bagian dari sistem pendidikan nasional. Artinya, ia inklusif dalam sistem pendidikan nasional, tidak berada di luar sistem pendidikan nasional (tidak eksklusif). Konsekuensinya, sekolah ini tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang ada, meskipun ia juga memiliki keleluasaan sesuai dengan misi dan tujuannya serta status pengelolaannya.
- k. Sekolah unggul diproyeksikan untuk menjadi pusat keunggulan (**agent of excellence**) bagi sekolah-sekolah di sekitarnya. Artinya, sekolah ini bukan hanya memberikan manfaat kepada peserta didik yang ada di dalam sekolah tersebut, tetapi juga memiliki resonansi sosial kepada lingkungan di sekitarnya.

III. Filosofi

Sekolah unggul didasari filosofi yang berkenaan dengan hakikat manusia, hakikat pembangunan nasional,

tujuan pendidikan, dan usaha untuk mencapai tujuan pendidikan tersebut.

Pertama, manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa telah dilengkapi dengan berbagai potensi dan kemampuan. Potensi itu pada dasarnya merupakan anugerah kepada manusia yang semestinya dimanfaatkan dan dikembangkan, dan jangan disia-siakan. Di samping memiliki persamaan dalam sifat dan karakteristiknya, potensi tersebut memiliki tingkat dan jenis yang berbeda-beda. Pendidikan dan lingkungan umumnya berfungsi untuk mengembangkan potensi tersebut agar menjadi aktual dalam kehidupan, sehingga berguna bagi orang yang bersangkutan, masyarakat dan bangsanya, serta menjadi bekal untuk menghambakan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dengan demikian, usaha untuk mewujudkan anugerah potensi tersebut secara penuh merupakan konsekuensi dari amanah Tuhan Yang Maha Esa.

Kedua, dalam pembangunan nasional, manusia merupakan faktor sentral, yaitu sebagai subyek pembangunan. Untuk dapat memainkan perannya sebagai subyek, maka manusia Indonesia dikembangkan untuk menjadi manusia yang utuh, yang segenap dimensi potensinya berkembang secara wajar. Pendidikan nasional mengemban tugas dalam mengembangkan manusia Indonesia sehingga menjadi manusia yang utuh dan sekaligus merupakan sumberdaya pembangunan.

Ketiga, pendidikan nasional berusaha menciptakan keseimbangan antara pemerataan pemberian kesempatan dan keadilan. Pemerataan pemberian kesempatan berarti membuka kesempatan seluas-luasnya kepada semua peserta didik dari semua lapisan masyarakat untuk mendapatkan pendidikan tanpa dihambat oleh perbedaan jenis kelamin, suku bangsa, dan agama. Akan tetapi, memberikan kesempatan yang sama (**equal opportunity**) pada akhirnya akan dibatasi oleh kondisi obyektif peserta didik, yaitu kapasitasnya untuk dikembangkan. Untuk mencapai keunggulan dalam pendidikan, maka diperlukan intensi bukan hanya memberikan kesempatan yang sama, melainkan memberikan perlakuan yang sesuai dengan kondisi obyektif peserta didik. Perlakuan pendidikan yang adil pada akhirnya adalah perlakuan yang didasarkan pada minat, bakat, dan kemampuan peserta didik. Di pihak lain, memperlakukan secara sama terhadap setiap peserta didik yang berbeda bakat, minat, dan kemampuannya merupakan ketidakadilan.

Keempat, dalam upaya mengembangkan kemampuan peserta didik, pendidikan berpegang kepada asas keseimbangan dan keselarasan, yaitu keseimbangan antara kreativitas dan disiplin, keseimbangan antara persaingan dan kerjasama, keseimbangan antara pengembangan kemampuan berpikir holistik dengan kemampuan berpikir atomistik, dan keseimbangan antara tuntutan dan prakarsa.

IV. Dasar hukum

Penyelenggaraan sekolah unggul pada dasarnya merupakan pengejawantahan UUD 1945, Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) 1993, dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN) serta peraturan pelaksanaannya.

Dalam GBHN 1993 dikemukakan:

"Peserta didik yang memiliki tingkat kecerdasan luar biasa perlu mendapat perhatian lebih khusus agar dapat dipacu perkembangan prestasi dan bakatnya".

Dalam UU No. 2 Tahun 1989 terdapat pasal-pasal yang menunjang penyelenggaraan sekolah unggul, seperti tersebut di bawah ini.

Pasal 8 ayat (2): "Warga negara yang memiliki kemampuan dan kecerdasan luar biasa berhak memperoleh perhatian khusus".

Pasal 24 ayat (1): "Setiap peserta didik berhak mendapatkan perlakuan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya".

Pasal 24 ayat (6): "Setiap peserta didik berhak menyelesaikan program pendidikan lebih awal dari waktu yang ditentukan".

Pasal 26: "Peserta didik berkesempatan untuk mengembangkan kemampuan dirinya dengan belajar pada setiap saat dalam perjalanan hidupnya sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya masing-masing".

Dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar dan PP No. 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah terdapat pasal-pasal yang berkenaan dengan perlunya perhatian khusus kepada peserta didik yang berkemampuan luar biasa, sebagai penjabaran lebih lanjut dari UU No. 2 Tahun 1989.

Berdasarkan kutipan peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan sekolah unggul memiliki dasar hukum yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan.

V. Visi dan misi

Sekolah unggul didasari visi bahwa upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional yang bermuara kepada tujuan pembangunan nasional memerlukan usaha-usaha yang sistematis, terarah, dan intensional dalam menggali dan mengembangkan potensi manusia Indonesia secara optimal sehingga dapat menjadi bangsa yang maju, sejahtera, damai, dengan berdasarkan Pancasila, serta dihormati dan

diperhitungkan oleh bangsa-bangsa lain dalam percaturan global.

Berdasarkan visi tersebut, maka misi sekolah unggul adalah meningkatkan dan mengembangkan potensi sumberdaya manusia Indonesia sebagai subyek dan wahana untuk mencapai tujuan pembangunan nasional.

VI. Tujuan

Acuan dasar tujuan umum sekolah unggul adalah tujuan pendidikan nasional sebagaimana tercantum dalam GBHN 1993 dan Undang-Undang No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yaitu menghasilkan manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, berkepribadian, mandiri, tangguh, cerdas, kreatif, terampil, berdisiplin, beretos kerja, profesional, bertanggung jawab, produktif, sehat jasmani dan rohani, memiliki semangat kebangsaan, cinta tanah air, kesetiakawanan sosial, kesadaran akan sejarah bangsa dan sikap menghargai pahlawan, serta berorientasi ke masa depan.

Secara khusus, sekolah unggul bertujuan untuk menghasilkan keluaran pendidikan yang memiliki keunggulan dalam hal-hal sebagai berikut, yaitu (a) keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa; (b) nasionalisme dan patriotisme yang tinggi, (c) wawasan IPTEK yang mendalam dan luas; (d) motivasi dan

komitmen yang tinggi untuk mencapai prestasi dan keunggulan; (e) kepekaan sosial dan kepemimpinan; dan (f) disiplin yang tinggi yang ditunjang oleh kondisi fisik yang prima.

VII. Sasaran

Pada jenjang pendidikan menengah, sasaran yang ingin dicapai oleh sekolah ini adalah menyiapkan para lulusan untuk memasuki jenjang pendidikan tinggi yang bermutu baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Di samping itu, dengan bekal kemampuan yang diperolehnya, mereka juga diproyeksikan untuk siap memasuki jalur karir yang lain atau mampu bekerja mandiri apabila tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

VIII. Kurikulum

Bertolak dari pertimbangan-pertimbangan yang menjadi tujuan pengembangan konsep sekolah unggul dan kaidah-kaidah dasar penyelenggaraan proses belajar-mengajar (PBM) sekolah unggul, maka kurikulum yang diperlukan adalah kurikulum yang tidak hanya memperhatikan integrasi antara pengembangan logika, etika dan estetika; integrasi antara pengembangan pengetahuan, keterampilan dan sikap; integrasi antara pengembangan kemampuan berpikir holistik, kreatif, sistemik dan kemampuan berpikir sistematis, linear dan konvergen;

integrasi antara kepentingan kebutuhan masa kini dan tuntutan kebutuhan masa depan; tetapi juga memperhatikan kebutuhan dan kondisi spesifik daerah.

Oleh sebab itu, kurikulum sekolah unggul seharusnya memiliki tingkat fleksibilitas yang tinggi dan cukup representatif, esensial, multivalensi dan menarik. Dalam hal ini, kurikulum yang demikian itu dapat dicerminkan dalam topik-topik bahasan dengan kriteria-kriteria sebagai berikut.

1. Seberapa jauh suatu topik yang ada dalam kurikulum itu diperlukan sebagai bekal oleh peserta didik untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan untuk terjun ke masyarakat maupun untuk kepentingan melanjutkan pelajaran ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.
2. Seberapa jauh suatu topik yang ada dalam kurikulum itu berperan sebagai prasyarat dan/atau tumpuan bagi topik-topik lain, tidak hanya dalam rangka pembentukan dan pemilikan pengetahuan dan keterampilan yang fungsional untuk memperoleh pekerjaan dan terjun ke masyarakat, melainkan juga topik tersebut diperlukan sebagai dasar untuk belajar ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Sebab meskipun tidak merupakan prioritas untuk kepentingan belajar lanjut, kemungkinan suatu topik diperlukan untuk memberikan nilai tambah bagi topik-topik lain.

3. Seberapa jauh suatu topik yang ada dalam kurikulum itu memiliki tingkat keterpakaian (**applicability**) yang amat luas sehingga memberi kemungkinan penggunaan yang lebih besar untuk menyesuaikan diri terhadap situasi yang selalu berubah/berkembang apabila terjun ke tengah-tengah masyarakat.
4. Seberapa jauh suatu topik yang ada dalam kurikulum itu dapat menumbuhkan minat dan daya tarik yang besar untuk mempelajarinya sehubungan dengan pengembangan pengetahuan dasarnya ataupun kegunaannya yang bersifat praktis dalam kehidupan sehari-hari.

Dengan akan diberlakukannya kurikulum 1994, kaidah-kaidah yang dikemukakan itu seyogyanya dijadikan acuan oleh guru tidak hanya dalam menunaikan tugas PBM di kelas, melainkan juga pada kegiatan-kegiatan kokurikuler.

IX. Proses Belajar-Mengajar

Dalam rangka pengembangan model PBM pada sekolah unggul terdapat empat hal yang seyogyanya mendapat perhatian. **Pertama**, apa yang menjadi tujuan atau sasaran operasional pengembangan PBM yang berciri tersendiri dari sebuah sekolah unggul. Tujuan inilah kelak yang membedakan antara sekolah unggul dan sekolah lain.

Kedua, upaya-upaya apa yang seyogyanya dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam kaitan ini, kurikulum yang bagaimana yang seharusnya diberlakukan untuk menghasilkan lulusan yang bermutu sebagaimana yang diharapkan. Bagaimana pula implikasi pemberlakuan kurikulum tersebut terhadap keseluruhan kegiatan PBM. **Ketiga**, unsur-unsur apa yang menjadi hakikat penyelenggaraan proses belajar-mengajar pada sekolah unggul itu.

Ketiga hal tersebut merupakan satu pertautan holistik yang selanjutnya berkaitan dengan berbagai aspek lain, seperti (1) peranan dan kedudukan guru dalam kegiatan PBM, (2) hubungan guru-siswa, (3) hubungan antara sekolah dengan masyarakat dan lingkungan sekitarnya, dan (4) administrasi dan pengelolaan PBM. Keempat hal ini merupakan unsur-unsur utama yang secara internal menentukan dinamika PBM pada Sekolah Unggul yang hendak dirintis itu.

Apabila tujuan pendidikan menengah sebagaimana yang diamanatkan dalam PP No. 29 tahun 1990 dijadikan acuan dalam keseluruhan proses penyelenggaraan pendidikan menengah maka terlihat suatu rentang permasalahan yang menuntut upaya perintisan sekolah unggul yang sesuai dengan tuntutan dasar tersebut. Pada hakikatnya pendidikan menengah bertujuan: (a) meningkatkan pengetahuan siswa untuk melanjutkan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi dan untuk mengembangkan diri sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan,

teknologi, dan kesenian; (b) meningkatkan kemampuan siswa sebagai anggota masyarakat dalam mengadakan hubungan timbal-balik dengan lingkungan sosial, budaya, dan alam sekitarnya.

Bertolak dari pertimbangan-pertimbangan yang menjadi tujuan tersebut, penyelenggaraan proses belajar-mengajar sekolah unggul akan diarahkan pada terwujudnya keselarasan dan keseimbangan antara : (1) masing-masing dimensi tujuan, (2) pengembangan kreativitas dan disiplin, (3) pengembangan persaingan dan kerjasama, (4) pengembangan kemampuan berpikir holistik dan kemampuan berpikir atomistik, (5) berpikir induktif dan deduktif, dan (6) tuntutan dan prakarsa. Keseimbangan-keseimbangan ini amat diperlukan dalam rangka pembekalan pengetahuan, sikap dan keterampilan yang memungkinkan peserta didik berperilaku fleksibel, mempunyai ketegasan, penuh keterbukaan, berorientasi masa depan, percaya diri sendiri untuk berinisiatif, penuh toleransi, mampu mengatasi ketidakpastian, disiplin, berani mengambil resiko dan bertanggungjawab serta berorientasi pada penyelesaian tugas.

Kaidah-kaidah dasar kegiatan proses belajar-mengajar ini diuraikan sebagai berikut.

1. Keseimbangan untuk Masing-masing Tujuan

Oleh karena peserta didik yang akan dihasilkan itu adalah sosok pribadi yang berkualitas seimbang, baik

Kedua, upaya-upaya apa yang seyogyanya dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam kaitan ini, kurikulum yang bagaimana yang seharusnya diberlakukan untuk menghasilkan lulusan yang bermutu sebagaimana yang diharapkan. Bagaimana pula implikasi pemberlakuan kurikulum tersebut terhadap keseluruhan kegiatan PBM. **Ketiga**, unsur-unsur apa yang menjadi hakikat penyelenggaraan proses belajar-mengajar pada sekolah unggul itu.

Ketiga hal tersebut merupakan satu pertautan holistik yang selanjutnya berkaitan dengan berbagai aspek lain, seperti (1) peranan dan kedudukan guru dalam kegiatan PBM, (2) hubungan guru-siswa, (3) hubungan antara sekolah dengan masyarakat dan lingkungan sekitarnya, dan (4) administrasi dan pengelolaan PBM. Keempat hal ini merupakan unsur-unsur utama yang secara internal menentukan dinamika PBM pada Sekolah Unggul yang hendak dirintis itu.

Apabila tujuan pendidikan menengah sebagaimana yang diamanatkan dalam PP No. 29 tahun 1990 dijadikan acuan dalam keseluruhan proses penyelenggaraan pendidikan menengah maka terlihat suatu rentang permasalahan yang menuntut upaya perintisan sekolah unggul yang sesuai dengan tuntutan dasar tersebut. Pada hakikatnya pendidikan menengah bertujuan: (a) meningkatkan pengetahuan siswa untuk melanjutkan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi dan untuk mengembangkan diri sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan,

teknologi, dan kesenian; (b) meningkatkan kemampuan siswa sebagai anggota masyarakat dalam mengadakan hubungan timbal-balik dengan lingkungan sosial, budaya, dan alam sekitarnya.

Bertolak dari pertimbangan-pertimbangan yang menjadi tujuan tersebut, penyelenggaraan proses belajar-mengajar sekolah unggul akan diarahkan pada terwujudnya keselarasan dan keseimbangan antara : (1) masing-masing dimensi tujuan, (2) pengembangan kreativitas dan disiplin, (3) pengembangan persaingan dan kerjasama, (4) pengembangan kemampuan berpikir holistik dan kemampuan berpikir atomistik, (5) berpikir induktif dan deduktif, dan (6) tuntutan dan prakarsa. Keseimbangan-keseimbangan ini amat diperlukan dalam rangka pembekalan pengetahuan, sikap dan keterampilan yang memungkinkan peserta didik berperilaku fleksibel, mempunyai ketegasan, penuh keterbukaan, berorientasi masa depan, percaya diri sendiri untuk berinisiatif, penuh toleransi, mampu mengatasi ketidakpastian, disiplin, berani mengambil resiko dan bertanggungjawab serta berorientasi pada penyelesaian tugas.

Kaidah-kaidah dasar kegiatan proses belajar-mengajar ini diuraikan sebagai berikut.

1. Keseimbangan untuk Masing-masing Tujuan

Oleh karena peserta didik yang akan dihasilkan itu adalah sosok pribadi yang berkualitas seimbang, baik

fisik-jasmaniahnya maupun mental-rohaniannya, baik raga dan jiwanya maupun akal dan semangatnya, maka tujuan tersebut harus dapat diterjemahkan dalam proses belajar-mengajar yang menyelaraskan aspek-aspek tersebut dalam suatu keterkaitan holistik.

2. Keseimbangan antara Kreativitas dan Disiplin

Untuk menjawab tantangan masa depan, kreativitas diperlukan agar bangsa Indonesia bukan sekedar menjadi pengguna IPTEK, konsumen budaya, maupun menjadi penerima nilai-nilai luar secara pasif, melainkan memiliki keunggulan kompetitif dalam penguasaan IPTEK. Oleh sebab itu, kreativitas perlu dikembangkan melalui penciptaan situasi PBM yang kondusif di mana pendidik mendorong vitalitas keingintahuan peserta didik untuk mencipta, dan memberi fungsi baru terhadap sesuatu yang telah ada. Dengan demikian, kreativitas harus dipupuk terus melalui berbagai kegiatan belajar yang dapat memacu pengembangan berpikir kreatif itu. Misalnya, peserta didik dilatih untuk menguasai teknik-teknik bertanya sedini mungkin.

Selanjutnya, peserta didik perlu diberi kesempatan untuk melakukan berbagai eksperimen dalam arti luas. Rangsangan-rangsangan diberikan peserta didik melalui pertanyaan maupun penugasan sehingga mereka dapat melihat suatu hal dari berbagai sudut pandang dan dapat menemukan berbagai alternatif pemecahan masalah yang dihadapi. Alternatif-alternatif tersebut dapat berupa

kemampuan menggambarkan suatu skenario tentang masa depan.

Di sisi lain, peserta didik dituntut pula belajar disiplin melalui proses belajar yang kondusif terhadap pembentukan sikap tersebut. Melalui proses belajar-mengajar yang sarat dengan penanaman sikap dan kebiasaan menyelesaikan tugas tepat pada waktunya, sikap disiplin tersebut dapat terbentuk. Oleh sebab itu, peserta didik perlu diberi kesempatan untuk menyelesaikan berbagai tugas seperti membuat ringkasan; mencari informasi melalui bacaan, pengamatan, wawancara; menerapkan konsep dalam bentuk latihan, praktikum, eksperimen, dan sebagainya dengan disiplin kerja yang ketat. Melalui rangsangan dan pembiasaan ini peserta didik memperoleh internalisasi nilai yang menopang terbentuknya sikap disiplin yang tangguh.

3. Keseimbangan antara Persaingan dan Kerjasama

Peserta didik akan dapat berprakarsa secara kreatif apabila proses belajar-mengajar dilakukan secara terencana untuk membangkitkan prakarsa kompetitif. Oleh sebab itu, kegiatan proses belajar-mengajar yang memberi peluang kepada peserta didik untuk menyelesaikan tugas secara kompetitif perlu diberikan. Pemberian penghargaan kepada mereka yang berprestasi akan berdampak positif terhadap terbentuknya rasa percaya pada diri sendiri. Pengalaman ini selanjutnya dapat menyangga proses pembentukan kemandirian.

Di sisi lain, peserta didik perlu pula dilibatkan pada proses belajar-mengajar yang memberi pengalaman dalam bekerjasama untuk menyelesaikan suatu tugas. Misalnya, peserta didik diberi tugas membuat ringkasan; mencari informasi melalui bacaan, pengamatan, dan wawancara; menerapkan konsep dalam bentuk latihan, praktikum, eksperimen dan tugas-tugas ini dikerjakan secara berkelompok. Pengalaman belajar seperti ini dapat membentuk sikap koperatif dengan pengalaman nyata untuk menghargai segala kelebihan dan kekurangan masing-masing.

4. Keseimbangan antara Pengembangan Kemampuan Berpikir Holistik dan Kemampuan Berpikir Atomistik

Kemampuan berpikir holistik, sistemik dan imajinatif dapat dibentuk melalui kegiatan proses belajar-mengajar yang dapat memacu pengembangan kemampuan berpikir tersebut. Oleh sebab itu, peserta didik perlu dilibatkan dalam berbagai kegiatan yang diarahkan untuk memecahkan masalah melalui kemampuan melihat persoalan dalam kaitannya dengan berbagai komponen lain secara holistik dan dapat mendudukan persoalan itu dalam konteks yang lebih sistemik. Dengan demikian peserta didik akan terlatih untuk berpikir secara holistik.

Selanjutnya di sisi lain, peserta didik perlu pula dipacu dalam hal pengembangan kemampuan berpikirnya secara logis, sistematis, linear, dan atomistik. Artinya, kegiatan proses belajar-mengajar tersebut diarahkan agar peserta

didik dapat memecahkan suatu persoalan dengan hanya satu jawaban yang benar. Oleh sebab itu, mereka perlu dilibatkan dalam kegiatan proses belajar-mengajar melalui pemberian tugas. Misalnya, peserta didik ditugasi membuat ringkasan; mencari informasi melalui bacaan, pengamatan, dan wawancara; menerapkan konsep dalam bentuk latihan, praktikum, eksperimen, dan tugas-tugas sejenis lainnya. Tugas-tugas tersebut diarahkan sedemikian rupa sehingga peserta didik menjadi terlatih untuk berpikir atomistik, logis dan sistematis untuk memecahkan suatu persoalan.

5. Keseimbangan antara Berpikir Induktif dan Deduktif

Salah satu aspek yang amat penting dalam kegiatan proses belajar-mengajar adalah bagaimana peserta didik dapat terlatih berpikir secara induktif. Artinya, kegiatan proses belajar-mengajar diarahkan sedemikian rupa sehingga peserta didik dapat mempelajari suatu materi pelajaran melalui pengalaman.

Dengan cara seperti ini mereka dapat secara langsung diterjunkan pada situasi nyata di lapangan. Misalnya, peserta didik diberikan tugas membuat ringkasan; mencari informasi melalui bacaan, pengamatan, dan wawancara; menerapkan konsep dalam bentuk latihan, praktikum, eksperimen, dan sebagainya yang diarahkan untuk menarik suatu kesimpulan induktif dari suatu persoalan yang dihadapi.

Selanjutnya, peserta didik diarahkan pula untuk menarik deduksi dari konsep-konsep yang telah dipelajari. Oleh sebab itu, kegiatan proses belajar-mengajar perlu memberi kesempatan kepada mereka untuk berlatih berpikir secara deduktif. Misalnya, dengan memberikan tugas kepada peserta didik berupa membuat ringkasan; mencari informasi melalui bacaan, pengamatan, dan wawancara; menerapkan konsep dalam bentuk latihan, praktikum, eksperimen, dan tugas-tugas lain yang sejenis dan semuanya itu diarahkan untuk memecahkan sesuatu persoalan dengan analisis deduktif.

6. Keseimbangan antara Tuntutan dan Prakarsa

Untuk kondisi tertentu, peserta didik akan dapat berperan aktif dalam kegiatan proses belajar-mengajar apabila mereka diberi tuntutan pembiasaan dan keteladanan. Kondisi seperti ini dapat membentuk semangat loyalitas, toleransi, dan kemampuan adaptabilitas. Oleh sebab itu, pendekatan seperti ini harus diselaraskan dengan kegiatan proses belajar-mengajar yang memberi peluang kepada mereka untuk berprakarsa secara dinamis dan kreatif. Dengan demikian tugas-tugas yang diberikan perlu diarahkan sedemikian rupa sehingga kegiatan belajar-mengajar yang diperoleh berupa membuat ringkasan; mencari informasi melalui bacaan, pengamatan, dan wawancara; menerapkan konsep dalam bentuk latihan, praktikum, eksperimen, dan sebagainya dapat menyelaraskan tuntutan dan prakarsa tersebut.

Dengan cara seperti itu tuntutan tersebut tidak akan mematikan kreativitas peserta didik sehingga akan tercapai kualitas proses belajar-mengajar yang berorientasi pada pencapaian tujuan yang jelas, dan melibatkan siswa untuk mengembangkan potensinya secara optimal dalam kegiatan belajar yang berupa "**a joy of discovery**".

X. Tenaga Kependidikan

Tenaga kependidikan yang dimaksud dalam pengelolaan sekolah unggul setidaknya-tidaknya meliputi : (1) kepala sekolah, (2) guru, (3) tenaga BP, dan (4) pengembang kurikulum, dan (5) peneliti dan pengembang.

1. Kepala Sekolah

Kepala Sekolah memegang peranan yang amat penting dalam mengelola dan mengembangkan seluruh sumberdaya pendidikan yang dapat mendukung keunggulan sistem sebuah sekolah unggul. Oleh karena itu untuk pengelolaan sekolah unggul diperlukan Kepala Sekolah yang berkualitas yang antara lain meliputi penguasaan wawasan kependidikan, keterampilan pengelolaan sekolah, metode mengajar yang inovatif, dan pengetahuan perkembangan siswa.

2. Guru

Guru menempati peranan kunci dalam mengelola kegiatan PBM. Pada jenjang SD, sekolah unggul yang dirintis ini akan menggunakan pendekatan sistem guru kelas. Pada kelas-kelas awal (kelas I, II dan III) diutamakan menempatkan guru yang telah berpengalaman karena memerlukan kegiatan pembelajaran yang lebih cermat. Sedangkan pada SMP dan SMA menggunakan sistem guru mata pelajaran. Keunggulan guru baik di jenjang SD, SMP, maupun SMA tidak hanya ditakar dari kemampuan intelektualnya, melainkan juga keunggulan aspek moral, keimanan, ketakwaan, disiplin, dan tanggungjawab, dan keluasan wawasan kependidikannya dalam mengelola kegiatan proses belajar-mengajar.

Dengan demikian keunggulan guru perlu didukung oleh suasana yang kondusif melalui keterbukaan profesional yang ditandai dengan keluwesan pengembangan dan pengelolaan proses belajar-mengajar. Keluwesan dan diversifikasi layanan dalam penunaian tugas profesionalnya membawa konsekuensi kepada pembinaan kesejahteraannya.

3. Tenaga Bimbingan dan Penyuluhan

Tenaga Bimbingan dan Penyuluhan berperan tidak hanya untuk membantu mengembangkan perilaku-perilaku yang mengarah kepada pembentukan pribadi yang utuh dalam arti pribadi yang berkualitas baik fisik-jasmaniahnya

maupun mental rohaniahnya, baik raga dan jiwanya maupun akal dan semangatnya, tetapi juga memberi layanan untuk (1) memahami potensi, karakteristik, dan masalah perkembangan siswa, dan (2) membantu siswa memahami diri, mengembangkan rencana masa depan studi dan rencana karier.

4. Pengembang Kurikulum

Sekolah unggul pada hakikatnya adalah sekolah yang dapat membekali proses belajar-mengajar yang bermutu kepada siswa dengan kurikulum yang bermutu pula. Oleh karena itu penyelenggaraan sekolah unggul perlu dilengkapi dengan tenaga yang secara terus-menerus memantau dan mengkaji efektivitas penerapan kurikulum diukur dari kemampuan guru menyampaikan isi kurikulum dan tingkat daya serap siswa terhadap kurikulum tersebut.

5. Peneliti dan Pengembang

Sebagai sekolah unggul yang diharapkan dapat secara inovatif berkembang sesuai dengan misinya, perlu didukung dengan upaya penelitian dan pengembangan. Dengan adanya wadah penelitian dan pengembangan ini, sekolah unggul tersebut akan dapat mengembangkan pusat-pusat keunggulan baik yang ditopang oleh potensi siswa, potensi lingkungan, maupun potensi tenaga kependidikan yang ada. Dengan demikian penyelenggaraan sekolah unggul ini diharapkan menyatu dengan kehidupan

masyarakat sehingga kehadirannya mempunyai kontribusi nyata dalam pengembangan masyarakat di sekitarnya.

XI. Fasilitas Pendidikan

Salah satu faktor yang amat mendukung tercapainya tujuan penyelenggaraan sekolah unggul adalah ketersediaan dan kecukupan fasilitas pendidikan serta tenaga pengelola/operatornya. Penggunaan fasilitas tersebut seyogyanya memperhatikan prinsip efektivitas dan efisiensi. Oleh karena itu, adanya dan penggunaannya dapat memberikan kemudahan proses belajar-mengajar dan dapat mengembangkan potensi siswa. Di samping itu, fasilitas tersebut seyogyanya sesuai dengan kondisi lingkungan, kebutuhan setempat, karakteristik program, dan taraf perkembangan psikologis siswa. Fasilitas-fasilitas yang dimaksud adalah:

- laboratorium dan/atau ruang praktik;
- pengembangan bakat, kemampuan intelektual;
- peribadatan;
- perpustakaan;
- pusat sumber belajar;
- olahraga dan seni;
- layanan masyarakat;
- asrama;
- penelitian dan pengembangan;
- pusat-pusat pengembangan keunggulan; dan
- pengembangan IPTEK.

XII. Evaluasi

Evaluasi kegiatan dan kemajuan belajar siswa pada hakikatnya adalah upaya untuk mengumpulkan informasi tentang kemajuan siswa di sekolah yang bersangkutan. Evaluasi di sekolah unggul tidak hanya bertujuan untuk mengetahui kemajuan belajar siswa untuk keperluan perbaikan dan peningkatan kegiatan belajar siswa, melainkan juga untuk memperoleh umpan balik atau masukan bagi perbaikan pelaksanaan kegiatan proses belajar-mengajar.

Kedudukan evaluasi sebagai bagian dari strategi penguatan perlu diterapkan pada berbagai tingkat pelaksanaan kurikulum. Dalam hal ini, evaluasi perlu diterapkan baik dalam kelas (untuk kepentingan penilaian harian) maupun dalam satuan jenjang; baik evaluasi pada akhir satuan pelajaran, satuan mingguan, bulanan; maupun pada satuan lainnya; bahkan pada satuan pelajaran yang sedang dalam proses.

Dengan demikian evaluasi harus memiliki tingkat obyektivitas, komprehensif, dan validitas yang tinggi. Demikian pula bentuk tes atau penilaian yang kurang memacu pengembangan kemampuan berpikir siswa seyogyanya dihindari.

XIII. Model Pengelolaan

Struktur organisasi sekolah unggul tergantung pada bentuk kerjasama yang dipilih. Dalam hal ini, setidaknya ada tiga model pengelolaan yang dapat dikembangkan. **Pertama**, yayasan swasta bekerjasama dengan sekolah negeri. Sebagai contoh, model ini dilakukan melalui kerjasama antara Yayasan Soporung dengan SMAN 3 Balige. **Kedua**, yayasan swasta bekerjasama dengan yayasan swasta lain. Sebagai contoh, model ini diterapkan pada bentuk kerjasama antara Yayasan Panglima Besar Sudirman dengan Taman Siswa dalam perintisan SMA Taruna Nusantara. **Ketiga**, yayasan mandiri. Sebagai contoh, model ini dapat dilihat pada sekolah yang dirintis oleh Yayasan Al-Azhar dan Yayasan Tunas Harapan.

XIV. Aspek Pengelolaan

Aspek pengelolaan dalam sekolah unggul ini bersangkutan paut dengan strategi dan implementasi seluruh sumberdaya yang ada dalam sistem sekolah itu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Tujuan inilah kelak yang menggambarkan warna keunggulan sekolah tersebut. Oleh sebab itu bentuk pengelolaan pada sekolah unggul ini memiliki tingkat fleksibilitas yang tinggi, realistis, dan berorientasi jauh ke masa depan. Dengan demikian, pengelolaan sekolah unggul ini didasari oleh komitmen dan ketekunannya terhadap tugas, pemahaman yang sama

terhadap sekolah unggul, dan ke... semua pihak yang terlibat dalam kegiatan itu.

Oleh sebab itu keunggulan pengelolaan ini terletak pada pendayagunaan seluruh potensi dan sumberdaya yang ada agar semua pihak dapat memainkan fungsi keunggulannya masing-masing dalam berperan secara sungguh-sungguh untuk mencapai keunggulan tertentu yang telah ditetapkan.

XV. Pembiayaan

Pada hakikatnya terdapat dua jenis pembiayaan yang perlu diadakan dalam pendirian dan pengelolaan sekolah unggul. **Pertama**, biaya investasi awal yang meliputi segala biaya pengadaan prasarana dan sarana pendidikan (misalnya tanah, gedung, alat pelajaran, buku, dan sarana pendidikan lainnya). **Kedua**, biaya operasional dan pemeliharaan/perawatan penyelenggaraan sekolah unggul (misalnya gaji dan tunjangan guru, biaya operasional PBM, biaya pemeliharaan/perbaikan, rehabilitasi, dan renovasi).

Perpustakaan
Jenderal

3